**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| Lembar Pengesahan ........................................................................ | i |
| Kata Pengantar ................................................................................ | ii |
| Ringkasan Eksekutif ......................................................................... | iii |
| BAB I Pendahuluan .......................................................................... | 1 |
| BAB II Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) ................................. | 6 |
| BAB III Rencana Bisnis Anggaran dan Ambang Batas .................... | 14 |
| BAB IV Penutup ............................................................................... | 16 |
| Lampiran-Lampiran | iv |

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

**PUSKESMAS ............**

**No. 910 /………../438.5.2.1......*\*(diketik)/* 2020**

**KABUPATEN SIDOARJO**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

Sidoarjo, 3 Januari 2020

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan Kepala Puskesmas**............**

Kabupaten Sidoarjo

drg. SYAF SATRIAWARMAN,Sp.Pros **............**

Pembina Utama Muda **Pembina.......**

NIP. 196307181991031004 NIP**............**

**KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/999/404.1.3.2/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, Puskesmas**…………….**telah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2020.

RBA disusun berdasarkan kegiatan,kebutuhan dan kemampuan anggaran/ pendapatan BLUD puskesmas.........

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Puskesmas **…………….** Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan kegiatan dan keuangan Puskesmas **............**Tahun 2020, yang disusun mengacu Rencana Strategis Puskesmas **............** periode 2016-2020.

Sidoarjo, 3 Januari 2020

**Kepala Puskesmas............**

**............**

**Penata...../ Pembina.....**

**NIP. ............**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Tahun 2020 merupakan tahun ke-5 Puskesmas **............**Kabupaten Sidoarjo menerapkan PPK-BLUD.Secara umum kondisi puskesmas cukup stabil,dan kondisi internal cukup kondusif untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79Tahun 2018 dalam upaya meningkatkan kinerja puskesmas.

RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. Penyusunan RBA berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya

Kinerja keuangan pada Tahun 2020, realisasi pendapatan jasa layanan diproyeksikan mencapai Rp (*Pendapatan BLUD saja*)**............**dan pendapatan subsidi sebesarRp. (*APBD dan BOK*)**............**Hal ini terutama disebabkan adanya dana kapitasi BPJS yang dialokasikan kepada puskesmas**.**

Asumsi dan kondisi yang menjadi dasar penyusunan RBA Tahun 2020meliputi asumsi makro dan mikro ekonomi yang mencakup antara lain pertumbuhan ekonomi regional, laju inflasi, nilai kurs, tarif dan volume pelayanan dan lain-lain asumsi yang relevan.

Anggaran belanja Puskesmas ....... Tahun 2020 sebesar Rp...........yang terdiri dari Belanja Operasipuskesmas Rp........ dan Belanja Modal Rp............

Anggaran pembiayaan Puskesmas ........... Tahun 2020 sebesar Rp. ......(*lihat sheet pembiayaan)*.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp........, Belanja Barang/ Jasa Rp................ Belanja Bunga Rp............ Belanja Operasi Lain-lain Rp...................

Rencana belanja modal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp............ yang pendanaannya berasal dari pendapatan fungsional sebesar Rp............ dan APBD sebesar Rp............,yang digunakan untuk tanah Rp…….. bangunan Rp…….. peralatan dan mesin Rp……….. (*sesuai penggunaan pengeluaran investasi*).

Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Persentase ambang batas dalam RBA ini diperkirakan sebesar ….. (*sesuai ambang batas masing-masing pusk)* terhadap total belanja operasional yang pendanaannya bersumber dari pendapatan fungsional. Hal ini didasarkan pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya yaitu pelampauan target pendapatan rata-rata yang dicapai adalah (*sesuai prosentase kenaikan pendapatan masing-masing pusk)*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/999/404.1.3.2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di KabupatenSidoarjo, sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Daerah, Puskesmas ……..diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat (yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/999/404.1.3.2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di KabupatenSidoarjodan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas ..... yang telah ditetapkan sebagai BLUD, berkewajiban menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis.

RBA merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi:

1. Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Rinciananggaranpendapatan, belanjadanpembiayaan;
3. Perkiraanharga;
4. BesaranpersentaseAmbang Batas;
5. Perkiraan majuatau *forward estimate*.

Penyusunan RBA berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Puskesmas ………Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah menjabarkan Rencana Strategis ke dalam perencanaan jangka pendek yang merupakan bagian dari dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Penyusunan RBA Tahun 2020 diupayakan sebagai perwujudan dari integrasi Program Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang pentahapannya telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan RBA tersebut merupakan perumusan rencana capaian kinerja Puskesmas …….. melalui program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan meletakan komitmen kepada pencapaian peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyusunan RBA ini bertujuan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1. **DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RBA Puskesmas …… Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 adalah :

* 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskemas;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
  13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2017   Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  15. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/999/404.1.3.2/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sedati Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

1. **VISI**

Visi Puskesmas ……….sebagaimana tertuang dalam review renstra ke-2 puskesmas adalah“**KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**”

1. **MISI**

Untuk mencapai visi tersebut, Puskesmas ……. menetapkan misi sesuai dengan misi Kabupaten Sidoarjo yang ke-3 yaitu :

**Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan**.

1. **SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLUD**

Memuat susunan pejabat pengelola BLUD berdasarkan keputusan pejabat berwenang.

Susunan Pejabat Pengelola BLUD saat ini adalah :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PEMIMPIN BLUD** |  |  |
| Kepala Puskesmas**…………..** | : | **……………………** |
| **PEJABAT KEUANGAN** |  |  |
| Kepala Sub BagianTata Usaha | : | **…………………....** |
| **PEJABAT TEKNIS** | : | **…………………....** |
|  |  |  |

**BAB II**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Dasar hukum tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 Ayat (3); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

**INDIKATOR SPM DAN TARGET KINERJA**

1. **Target kinerja pelayanan UKP**

| **NO** | **JENIS PELAYANAN** | **INDIKATOR** | | **STANDAR** | **TARGET 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **URAIAN** |
| 1 | Pelayanan Gawat Darurat | Input | 1. Kemampuan menangani Life Saving | 100% | 100% |
| 2. Pemberi Pelayanan Kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BCLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku | 100% | 100% |
| Proses | 1. Jam buka pelayanan gawat darurat 24 Jam | 100% | 100% |
| 2. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat | < 5 Menit | < 5 Menit |
| 3. Tidak adanya keharusan membayar uang muka | 100% | 100% |
| Outcome | Kepuasan Pasien | > 80 % | > 80 % |
| 2 | Pelayanan Rawat Jalan | Input | 1. Pemberi Pelayanan di Klinik Umum | 100% Dokter | 100% Dokter |
| 2. Pemberi Pelayanan di KIA | 100% Bidan terlatih | 100% Bidan terlatih |
| 3. Pemberi Pelayanan di Gigi | 100% Dokter Gigi | 100% Dokter Gigi |
| Proses | 1. Jam Buka Pelayanan dengan ketentuan | 07.00 s/d 12.00 setiap hari kerja  kecuali Jum'at : 08.00 - 10.00; Sabtu 07.00 - 11.00 | 07.00 s/d 12.00 setiap hari kerja  kecuali Jum'at : 08.00 - 10.00; Sabtu 07.00 - 11.00 |
| 2. Kepatuhan Hand Hygiene | 100% | 100% |
| 3. Waktu tunggu rawat jalan | < 30 menit | < 30 menit |
| 4. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis | 100% | 100% |
| 5. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS | 100% | 100% |
| Output | 1. Peresapan obat sesuai formularium | 100% | 100% |
| 2. Pencatatan dan Pelaporan TB di Puskesmas | 100% | 100% |
| Outcome | Kepuasan Pasien | >80% | >80% |
| 3 | Pelayanan Rawat Inap | input | 1. Pemberi pelayanan adalah dokter dan perawat yang kompeten (minimal D3) | 100% | 100% |
| 1. Tempat tidur dengan pengaman | 100% | 100% |
| 1. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan | 100% | 100% |
|  | 1. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap | 100% | 100% |
| Proses | 1. Jam visite dokter (antara jam 08.00-14.00) | 100% | 100% |
| 1. Kepatuhan hand hygiene | 100% | 100% |
| 1. Tidak adanya kejadian pasien jatuh | 100% | 100% |
| Output | 1. Kejadian pulang sebelum sembuh | <5% | <5% |
| 1. Kematian pasien >48 jam | <0,24% | <0,24% |
| Outcome | Kepuasan Pasien | >80% | >80% |
| 4 | Persalinan | Input | Pemberi Pelayanan persalinan normal | Bidan terlatih | Bidan terlatih |
| Proses | 1. Pelayanan Persalinan oleh bidan terlatih | 100% | 100% |
| 2. Kepatuhan Hand Hygiene | 100% | 100% |
| Output | Kematian ibu karena persalinan | 0% | 0% |
| Outcome | Kepuasan Pasien | >80% | >80% |
| 5 | Pelayanan Laboratorium Sederhana | Input | Fasilitas dan peralatan | Sesuai standart Puskesmas | Sesuai standart Puskesmas |
| Proses | 1. Waktu tunggu hasil Pelayanan | <120 menit | <120 menit |
| 2. Tidak adanya kejadian tertukar spesimen | 100% | 100% |
| 3. Kemampuan memeriksa HIV-AIDS | Elisa Test | Elisa Test |
| 4. Kemampuan Mikroskopis TB Paru | Tersedia tenaga, peralatan, reagen | Tersedia tenaga, peralatan, reagen |
| Output | 1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium | 100% | 100% |
| 2. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal | 100% | 100% |
| Outcome | 1. Kepuasan pelanggan | > 80% | > 80% |
| 6 | Pelayanan Farmasi | Input | 1. Pemberi pelayanan farmasi | Sesuai standart Puskesmas | Sesuai standart Puskesmas |
| 2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi | Sesuai standart Puskesmas | Sesuai standart Puskesmas |
| 3. Ketersediaan formularium | Tersedia dan update paling lama 3 tahun | Tersedia dan update paling lama 3 tahun |
| Proses | 1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi | <30 menit | <30 menit |
| 2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan | <60 menit | <60 menit |
| Output | Tidak adanya kejadian salah pemberian obat | 100% | 100% |
| Outcome | Kepuasan pelanggan | >80% | >80% |
| 7 | Pelayanan Gizi | Input | 1. Pemberi pelayanan gizi | 100% ahli Gizi | 100% ahli Gizi |
| 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi | Tersedia | Tersedia |
| Outcome | 1. Kepuasan pelanggan | >80% | >80% |
| 8 | Pelayanan Rekam Medik | Input | Pemberi Pelayanan rekam medis | sesuai persyaratan | sesuai persyaratan |
| Proses | 1. Waktu penyediaan Dokumen medis rawat jalan | <10 menit | <10 menit |
| 2. Waktu penyediaan Dokumen rekam medik pelayanan rawat inap | <15 menit | <15 menit |
| Output | 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan | 100% | 100% |
| 2. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas | 100% | 100% |
| Outcome | Kepuasan pelanggan | >80% | >80% |
| 9 | Pengelolaan Limbah | Input | 1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah puskesmas | Ada | Ada |
| 2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah puskesmas : padat dan cair | Sesuai peraturan perundangan | Sesuai peraturan perundangan |
| Proses | 1. Pengelolaan Limbah Cair | Sesuai peraturan perundangan | Sesuai peraturan perundangan |
|  | 2. Pengelolaan Limbah Padat | Sesuai peraturan perundangan | Sesuai peraturan perundangan |
| Output | Baku Mutu Limbah Cair | a. BOD < 30 mg/l | a. BOD < 30 mg/l |
| b. COD < 80 mg/l | b. COD < 80 mg/l |
| c. TSS < 30 mg/l | c. TSS < 30 mg/l |
| d. PH 6-9 | d. PH 6-9 |
| 10 | Administrasi dan Manajemen | Input | 1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi | > 90% | > 90% |
| 1. Adanya peraturan internal | Ada | Ada |
| 1. Adanya peraturan karyawan | Ada | Ada |
| 1. Adanya daftar urutan kepangkat karyawan | Ada | Ada |
| 1. Adanya perencanaan strategis Bisnis | Ada | Ada |
| 1. Adanya perencanaan pengembangan SDM | Ada | Ada |
| Proses | 1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan | 100% | 100% |
| 2. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat | 100% | 100% |
| 3. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala | 100% | 100% |
| 4. Pelaksanaan rencana Pengembangan SDM | >90% | 100% |
| 5. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan | 100% | 100% |
| 6. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap | <90 menit | <90 menit |
| Output | 1. Cost recovery | >60% | 85% |
| 2. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja | 100% | 100% |
| 3. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun | >10% | >10% |
| 4. Ketepatan waktu pemberian intensif sesuai kesepakatan waktu | 100% | 100% |
| 11 | Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah | Input | 1. Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil puskesmas keliling | 24 jam | 24 jam |
| 2.Penyedia pelayanan ambulans & mobil pusling | Supir ambulans terlatih | Supir ambulans terlatih |
| 1. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil pusling | Mobil Ambulans | Mobil Ambulans |
| Proses | 1. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans | <30 menit | <30 menit |
|  | 1. Waktu Tanggap pelayanan ambulans kepada yang membutuhkan | <30 menit | <30 menit |
| Output | 1. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan/kematian | 100% | 100% |
| Outcome | 1. Kepuasan pelanggan | >80% | >80% |
| 12 | Pelayanan laundry | Input | 1. Ketersediaan pelayanan laundry | Tersedia | Tersedia |
| 1. Adanya koordinator pelayanan laundry | Ada SKKa. Pukesmas | Ada SKKa. Pukesmas |
| 1. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry | Tersedia | Tersedia |
| Proses | 1. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan | 100% | 100% |
| 1. Ketepatan pengolaan inen infeksius | 100% | 100% |
| Output | 1. Ketersediaan linen | 3 setx jumlah tempat tidur | 3 setx jumlah tempat tidur |
| 13 | Pemeliharaan | Input | 1. Adanya penanggung jawab sarana prasarana pelayanan | SK Kapus | SK Kapus |
| 1. Ketersediaan bengkel kerja | Tersedia | Tersedia |
| Proses | 1. Waktu tanggap ketersediaan alat | >80 | >80 |
|  | 1. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan | 100% | 100% |
|  | 1. Ketepatan waktu kalibrasi alat | 100% | 100% |
| Output | Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu | 100% | 100% |
| 14 | Pencegahan dan Pengendalian infeksi | Input | 1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih | Anggota Tim PPI yang terlatih 75% | Anggota Tim PPI yang terlatih 75% |
| 2. Ketersediaan APD | 100% | 100% |
| 3. Rencana program PPI | Ada | Ada |
| Proses | 1. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana | 100% | 100% |
| 2. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas | 100% | 100% |
| Output | Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan infeksi nosokomial// rea Ith care associated infection (HAI) di Puskesmas | >75% | >75% |
| 15 | Pelayanan Keamanan | Input | 1. Petugas keamanan bersertifikat pengaman | 100% | 100% |
|  |  | 1. Sistem pengamanan | Ada | 100% |
|  |  | Proses | 1. Petugas Keamanan melakukan keliling Puskesmas | Setiap jam | Setiap jam |
|  |  | 1. Evaluasi terhadap sistem pengamanan | Setiap 3 bulan | Setiap 3 bulan |
|  |  | Output | 1. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang | 100% | 100% |
|  |  | Outcome | Kepuasan pasien | >81% | >81% |

1. **Target kinerja pelayanan UKM**

| **NO** | **NAMA INDIKATOR** | **STANDAR** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |  |
|  | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar | 100% |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |  |
|  | Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar | 100% |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |  |
|  | Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita |  |
|  | Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 5 | Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan Dasar |  |
|  | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif |  |
|  | Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |  |
|  | Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi |  |
|  | Setiap penderirta hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |  |
|  | Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |  |
|  | Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB |  |
|  | Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 100% |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV |  |
|  | Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | 100% |

**BAB III**

**RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN AMBANG BATAS**

1. **Rencana Bisnis Anggaran**

Rencana Bisnis dan anggaran terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan Tahun 2020 bersumber dari jasa layanan, hibah, pendapatan kerjasama, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta lain-lain pendapatan BLUD yang sah

1. Anggaran Belanja

Anggaran Beaalanja terdiri dari belanja operasi dan Belanja modal. Adapun belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain lain

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin , belanja gediung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya

1. Anggaran Pembiayaan

Pembiayanaan merupakan pendapatan dan pengeluaran anggaran Silpa tahun lalu

1. Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

Ringkasan merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan

1. Rincian Rencana Bisnis dan anggaran

Rincian merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan belanja dan pembiayaan

Seluruh rencana bisnis dan anggaran terlampir di halaman berikutnya.

Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2020 adalah Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas (RUK) Tahun 2020 (terlampir).

1. **Ambang Batas**

Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase.Besaran persentase tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Persentase ambang batas tersebut merupakan kebutuhan yang dapat dlprediksl, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persentase ambang batas dalam RBA ini sebesar ……% terhadap total belanja operasional khususnya belanja Obat, Bahan Kimia, Makan minum Pasien, dan Laboratorium, yang bersumber dari pendapatan fungsional. Hal ini didasarkan pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya yaitu pelampauan target pendapatan rata-rata ……. %.

# BAB IV

**PENUTUP**

Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Puskesmas ……..tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didukung dengan keleluasaan pengelolaan keuangan Puskesmas sebagai BLUD.Dokumen ini merupakan gambaran seluruh sasaran, program, kegiatan, serta rencana pendapatan dan pengeluaran selama tahun 2020 yang sumber dananya berasal dari penggunaan langsung pendapatan Jasa layanan Kesehatan dan alokasi APBD dan APBN.